

BAB V

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GURU PEMBIMBING KHUSUS

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik terkait guru pembimbing khusus di Kota Surabaya maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun pada penelitian saat ini menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III.

Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu:

1. Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
2. Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureaucratic structure* (Edward dalam Widodo, 2011:96-110).

5.1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011:97).

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transmisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Terkait implementasi perekrutan GPK di sekolah yang ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Surabaya berikut beberapa informasi yang dapat diperoleh dari beberapa informan:

Keterangan dari informan ke-1:

- a. Transmisi. GPK harus ada pelatihan secara khusus, sehingga fungsi GPKnya muncul. Tetapi di sekolah-sekolah tidak muncul. Sepertinya tidak semua ada GPKnya. Tidak mudah. Mencari lulusan PLB sulit. Mereka paham tetapi kesulitan mencari tenaga GPK
- b. Kejelasan. Paham karena ada sertifikasi PLB, tidak harus dari PLB. Yang ada saja diikutkan pelatihan, tentang pendampingan ABK bisa di Unesa atau SLB.
- c. Konsistensi. Deklarasi Surabaya sebagai kota inklusif tidak disertai dengan rekrutmen GPK yang dibutuhkan.

(Wawancara, september 2019)

Berikut adalah apa yang dapat disampaikan oleh Informan ke-2 dan ke-3 mengatakan:

Beberapa hal yang dapat saya sampaikan menurut pengalaman saya sewaktu saya mendapat tugas sebagai GPK di salah satu sekolah negeri di Surabaya. Adalah sebagai berikut:

- a. GPK yang ada masih sangat kurang. GPK yang memiliki latar belakang PLB sangat sedikit.
- b. GPK yang ada sebagian diambilkan dari guru akademik yang diberi pelatihan GPK itupun jumlahnya tidak banyak.

- c. Umumnya sekolah belum memiliki protap untuk GPK sehingga kebutuhan ABK tidak terjamin mendapatkan hasil yang maksimal.
- d. Beberapa sekolah menempatkan ABK pada kelas tersendiri untuk belajar bersama-sama sesama anak ABK. Hal ini tidak sesuai dengan semangat sekolah inklusif dimana anak-anak ABK memiliki kesempatan yang sama untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak non ABK.
- e. Masih ada keengganan sekolah yang ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusif, untuk menerima ABK karena akan menurunkan prestasi sekolah tersebut. Nilai ABK pada sekolah inklusif akan dihitung sama dengan anak-anak non ABK. Jadi semakin banyak menerima ABK sekolah khawatir prestasi sekolahnya akan menurun.

(Wawancara, september 2019)

Peneliti menemukan bahwa faktor komunikasi masih menjadi kendala implementasi GPK di sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah inklusif di Surabaya. Dari keterangan informan di atas, maksud dan tujuan diadakannya sekolah inklusif dan keberadaan GPK belum mencapai sasaran yang diharapkan.

Berikut tambahan informasi yang diberikan oleh informan ke-4 yang mengatakan:

- “Saya memiliki pengalaman penelitian untuk melihat sejauh mana GPK diimplementasikan di Kota Surabaya, saya meneliti di 50 SD yang ditunjuk oleh Kota Surabaya untuk menyelenggarakan sekolah inklusif. Beberapa catatan saya tentang sekolah inklusif sebagai berikut:
- a. Memang ada desakan dunia untuk menekan pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan sekolah dalam menyelenggarakan inklusif.
 - b. Kota Surabaya telah mendapat penghargaan dunia sebagai kota yang menyelenggarakan sekolah inklusif.
 - c. GPK di Sekolah yang ditunjuk menyelenggarakan pendidikan inklusif sangat kurang jumlahnya, saat ini diupayakan dengan memberikan pelatihan kepada guru-guru akademik agar bisa menampung ABK
 - d. Terkait komunikasi, memang ada kendala pada masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kriteria ABK yang bisa

mendapatkan fasilitas di sekolah inklusif. Ada kejadian dimana orangtua memaksakan agar anaknya bisa diterima di satu sekolah, padahal kebutuhan khususnya lumayan parah, tidak dapat dimasukkan di sekolah inklusif, seharusnya anaknya masuk ke sekolah SLB yang fasilitasnya lebih memadai untuk ABK yang memiliki keterbatasan akut. Namun orangtua ABK tersebut memaksakan untuk diterima. Memang ada pertimbangan finansial, kalau sekolah di sekolah penyelenggara inklusif, biayanya gratis dari Kota Surabaya. Sementara anaknya jika sekolah di SLB harus membayar sendiri dengan bilangan yang relatif mahal.

(Wawancara, september 2019)

Informan ke-4 yang merupakan penggiat sekolah inklusif memang sangat prihatin dengan keberadaan sekolah inklusif yang ditunjuk oleh Pemkot Surabaya terutama pemenuhan GPK. Dengan fakta bahwa GPK umumnya adalah guru akademik yang ditambah fungsinya sebagai GPK dimana beberapa diberi pelatihan dan beberapa tidak ada pelatihan sama sekali, hal ini justru sangat membahayakan.

Dari fakta bahwa GPK yang diharapkan tidak sesuai dengan kebutuhan ABK, dan saat ini sekolah inklusif terus dilanjutkan, menjadi sebuah pertanyaan besar sebenarnya ada modus apa di belakang kebijakan Kota Surabaya ini?

Jika dimatrikskan temuan pada faktor komunikasi terkait dengan implementasi GPK di Kota Surabaya maka dapat dilihat seperti di bawah ini:

Tabel 5.1. Matrik Faktor Komunikasi

NO	SUBYEK	KETERANGAN
1.	Masyarakat	Masih ditemukan masyarakat yang memaksakan anaknya yang tidak memenuhi kriteria ABK untuk diterima di sekolah penyelenggara inklusif. Hal ini menimbulkan permasalahan GPK yang harus menanganinya.
2.	Guru Pembimbing Khusus (GPK)	Guru kelas atau guru mata pelajaran/guru bidang studi mendapat tugas tambahan sebagai GPK, sementara mereka memiliki tugas utama sebagai guru reguler yang bertanggungjawab penuh terhadap Anak Tanpa Berkebutuhan Khusus

		(ATBK), dengan demikian tugas tambahan sebagai GPK dalam penanganan ABK kurang optimal bahkan terjadi pembiaran terhadap ABK tersebut.
3.	Pihak Sekolah	Belum ada kebijakan khusus untuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tentang sosialisasi lingkungan sekolah inklusif yang humanis, ramah, aman, nyaman, tanpa diskriminasi. Sehingga akan terjadi kebersamaan antara orangtua dengan lingkungan sekolah, orangtua dengan guru dan potensi yang dimiliki ABK dapat berkembang secara optimal.
4.	Pihak Kota Surabaya	Sampai saat ini Kota Surabaya belum mengeluarkan regulasi terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif. Khususnya terkait dengan perekrutan GPK. Proses perekrutan GPK masih menempuh cara dengan memberikan pelatihan GPK kepada guru reguler yaitu guru kelas atau guru mata pelajaran/guru bidang studi.

Sumber: Data Peneliti, 2019

5.2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa:

Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

2. Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Fasilitas (*facility*)

fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4. Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

Untuk mengetahui faktor sumber daya pada implementasi GPK di Kota Surabaya maka berikut ini peneliti menyampaikan beberapa keterangan yang didapat oleh peneliti dari beberapa informan yang diwawancarai, adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Informan ke-1:

- a. Staf/tenaga pelaksana: masih kurang
- b. Informasi: belum tersosialisasi
- c. Wewenang: ada dinas pendidikan kota (masuk kewenangan Otoda)
- d. Fasilitas fisik: yang memiliki sertifikasi pelatihan GPK pasti paham. Tetapi yang belum sertifikasi, tidak pasti

(Wawancara, september 2019)

Informan ke-4:

Terkait dengan sumber daya yang saya perhatikan adalah sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif memiliki keterbatasan peralatan pendukung untuk ABK. Misalnya sekolah yang memiliki lebih dari 1 lantai, beberapa ABK memiliki kesulitan untuk naik ke lantai atas. Demikian juga alat-alat bantu yang dibutuhkan masih sangat kurang. Ada kejadian karena kelas dari anak ABK ada di lantai atas, akhirnya, kelas tersebut dipindah ke bawah untuk mengakomodasi ABK. Hal ini jadi kurang ideal, karena akhirnya anak normal harus menyesuaikan dengan ABK.

(Wawancara, september 2019)

Peneliti menemukan bahwa, implementasi GPK di sekolah yang ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusif masih sangat terbatas. Faktor anggaran kelihatannya yang menjadi kendala utama sehingga pengadaan GPK saat ini belum dioptimalkan dari guru yang memiliki latar belakang PLB. Kendala juga dihadapkan dengan sumber daya lainnya yaitu ketersediaan fasilitas penunjang GPK, dan juga penunjang ABK.

Kondisi keberadaan GPK yang sangat minim menjadi potensi yang sangat berbahaya untuk ABK, bahkan ada sekolah yang sama sekali tidak memiliki GPK. Kondisi ini membuat beberapa sekolah akhirnya membuat inovasi sendiri sekedar hanya menjalankan perintah dengan mengumpulkan ABK pada ruangan tertentu dan memberikan pelajaran semampu mereka bisa. Pertanyaan besar kemudian muncul mengapa Pemkot Surabaya terkesan terburu-buru menyelenggarakan sekolah inklusif tanpa menyiapkan dulu GPK yang dibutuhkan?

Semangat Pemerintah Kota Surabaya patut diapresiasi namun, sebagai masyarakat juga harus dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kota

Surabaya salah satunya adalah melalui penelitian disertasi ini. Kebijakan penyelenggaraan sekolah inklusif sampai tahun 2019 seperti ditunjukkan pada tabel 5.2.

Tabel 5.2. Data Jumlah Sekolah Negeri Inklusif di Surabaya

NO	JENJANG	INKLUSIF	TOTAL	PROSENTASE
1.	SD	62	302	20%
2.	SMP	23	63	36%
3.	SMA	1	22	4%
4.	SMK	4	11	36%

Sumber: Data 2019 Pokja Inklusif Disdik Kota Surabaya

Sampai tahun 2019 jika dilihat kewenangan pihak Kota dan Kabupaten, maka jenjang sekolah inklusif yang dikelola Kota Surabaya adalah SD dan SMP sejumlah 85 sekolah inklusif, terdiri dari SD sejumlah 62 sekolah dan SMP sejumlah 23 Sekolah. Jika dibandingkan data Disdik Kota Surabaya tahun 2018 ada 78 sekolah SD dan SMP, berarti ada kenaikan sejumlah 7 sekolah di tahun 2019 yang ditunjuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Adapun jumlah GPK yang ada saat ini, sangat sulit bagi peneliti untuk mendapatkan data yang pasti. Berbagai kesempatan peneliti mencoba mencari data ke Disdik namun selalu gagal menemui orang yang dituju dengan berbagai alasan. Dengan semaksimal mungkin peneliti coba mendata dari beberapa sumber seperti di bawah ini:

Tabel 5.3. Jumlah Guru Yang Mendapat Pelatihan GPK di Kota Surabaya

NO	TAHUN	JUMLAH
1.	Juli 2017	900
2.	Maret 2019	99
3.	Agustus 2019	175 (terapi wicara)

Sumber: Jawa Pos, 2017 dan Disdik Kota Surabaya, 2019

Jika dilihat data pada table 5.3 jumlah guru yang dilatih menjadi GPK jumlahnya relatif banyak, yang menjadi pertanyaan selanjutnya apakah semua yang dilatih tersebut ditetapkan menjadi GPK?. Permasalahan lainnya bahwa guru kelas memiliki jenjang karier yang sudah ditentukan dengan tugas

pokoknya, sementara GPK hanya menjadi tugas tambahan. Regulasi yang berlaku bahwa GPK harus berlatar belakang PLB disini tidak diterapkan. Kekhawatiran kualitas GPK yang diambil dari guru kelas ini seperti yang di sampaikan oleh informan ke-4:

“dari pengalaman saya melaksanakan studi terkait sekolah inklusif, GPK yang ada di Kota Surabaya. Ketika saya menyebar kuisioner, semuanya kelihatan baik-baik saja. Jawaban-jawaban yang sifatnya normatif. Tetapi ketika saya melakukan wawancara secara mendalam. Sebagian besar tidak mengerti betul tugasnya sebagai GPK. Kesannya mereka dipaksakan untuk mengikuti pelatihan dan menjadi GPK. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh para guru kelas yang ditunjuk menjadi GPK. Diantaranya mereka tidak mengerti jenjang karier GPK ini bagaimana? Kemudian mereka tugas pokoknya adalah guru kelas. Waktu pelatihan pun relatif sangat pendek, sehingga masih belum memahami sepenuhnya.”

(Wawancara, September 2019)

Proses perekrutan GPK yang selama ini dilaksanakan oleh Kota Surabaya, belum sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu perekrutan GPK tidak berlatar belakang PLB dan juga memberikan tugas tambahan sebagai GPK kepada guru reguler.

Dari keterangan yang diberikan oleh informan ke-1 bahwa ada beberapa orangtua yang memindahkan anaknya ke sekolah inklusif yang lain karena kurang mendapat pelayanan seperti yang diharapkan, disamping itu ada beberapa ABK yang mengalami *bullying*. Bagi orangtua ABK yang mampu, mungkin bisa menempuh cara memindahkan ke sekolah inklusif yang lain yang lebih baik, tetapi yang harus dipikirkan adalah bagi orangtua ABK yang kurang mampu.

5.3. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Terkait dengan sikap pelaksana implementasi GPK di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif Kota Surabaya, terlihat bahwa Walikota Risma, sangat antusias untuk menyelenggarakan sekolah inklusif, begitu pula dengan staf Disdik Kota Surabaya, namun masalah ketersediaan GPK, yang masih perlu mendapat perhatian. Pihak Kota Surabaya terfokus pada guru reguler/guru mata pelajaran yang diberikan tugas tambahan sebagai GPK. Seharusnya GPK adalah guru yang mempunyai latar belakang PLB.

Adapun data yang dapat ditemukan oleh peneliti dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan, berikut adalah informasi yang dapat diberikan:

Informan ke-1:

- a. Sikap : bagus
- b. Komitmen: perekrutan GPK gak pernah ada, hanya mengandalkan hasil PLB Unesa

(Wawancara, september 2019)

Informan ke-4:

Secara umum hasil dari penelitian saya terkait implementasi GPK di Sekolah Inklusif di Surabaya yang saya teliti terjadi perbedaan yang sangat besar data kuisioner yang saya minta diisi oleh GPK dengan hasil wawancara yang saya lakukan pada setiap GPK. Mereka sangat merasa kewalahan mengatasi anak ABK. Bahkan GPK berlatar belakang PLB pun mengeluh, karena mereka merasa terpaksa melayani berbagai jenis ABK. Memang pada kenyataannya ABK itu digolongkan secara umum 4 macam, ABK yang tidak masuk dalam golongan tersebut diarahkan ke sekolah SLB, biasanya ABK tersebut memiliki keterbatasan yang sangat tinggi sehingga tidak bisa diterima di sekolah inklusif. Penanganan ABK memang sangat khusus tergantung dari keterbatasan yang dimilikinya

(Wawancara, september 2019)

Dari temuan peneliti terkait sikap pelaksana terhadap implementasi GPK di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Surabaya dapat tergambarkan dari hasil wawancara dengan para informan. Sikap Kota Surabaya yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak didukung dengan komitmen untuk menyediakan GPK sesuai yang dibutuhkan. Faktanya bahwa GPK memiliki dasar PLB pun mengalami keterbatasan dalam menangani ABK. Karena ABK memiliki kriteria tertentu. Apalagi jika guru GPK yang ditunjuk tidak memiliki bekal GPK.

Pemkot Surabaya sampai saat ini masih fokus pada pemberian tugas tambahan kepada guru mata pelajaran/guru bidang studi sebagai GPK, dikarenakan GPK lulusan PLB masih sangat terbatas, sehingga pemenuhan GPK di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Surabaya belum optimal.

5.4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standart Operation Procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Peneliti melaksanakan pengumpulan data wawancara, observasi di Kota Surabaya pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan hasil wawancara dengan beberapa informan adalah sebagai berikut:

Informan ke-1:

- a. SOP: belum pernah ada
- b. Fragmentasi: sudah ada, tetapi di sekolah negeri tidak pasti.

(Wawancara, september 2019)

Informan ke-4:

- a. Ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan sebagai berikut:
Keterbatasan GPK yang memiliki bekal PLB saat ini dipenuhi dari dari guru akademik yang diberi pelatihan.

- b. Masukan dari saya untuk GPK selain penerimaan dari jalur yang ada sekarang. Bisa juga S1 lulusan program keguruan diberi pelatihan. Mengapa S1 dari program keguruan, ada beberapa alasan yang pertama adalah, syarat untuk menjadi guru itu sekarang adalah harus S1, kemudian S1 dari program keguruan sudah lebih banyak menerima materi tentang bagaimana menjadi guru, sehingga menurut saya akan lebih efektif, jika S1 keguruan yang diberi pelatihan inklusif dapat memenuhi kebutuhan GPK, khususnya di Surabaya.

(Wawancara, september 2019)

Dari keterangan informan di atas, maka peneliti dapat memberikan analisis dan pembahasan bahwa keberadaan GPK di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif Kota Surabaya dalam kondisi yang belum optimal, hal ini perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh dan segera untuk dapatnya dilakukan evaluasi.